

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak tahun 1999, sistem pemerintahan di Indonesia mulai memberlakukan sistem otonomi daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbarui dengan UU Nomor 32 tahun 2004. Mengacu pada undang-undang tersebut, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 32 Tahun 2004). Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, melainkan kebebasan yang terbatas atau kemandirian yang terwujud dalam pemberian kesempatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan (Syarifudin, 1991).

Dengan adanya otonomi dan desentralisasi ini pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan potensi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Dengan adanya pembagian kewenangan pemerintahan antara pusat dan daerah ini diharapkan pertumbuhan dan pembangunan pada masing-masing daerah dapat lebih merata karena mempertimbangkan aspirasi dari masyarakat pada daerah tersebut. Adanya otonomi daerah ini merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaan desentralisasi penyediaan sarana prasarana. Dalam pelaksanaannya, pendekatan kebijaksanaan digunakan untuk menyempurnakan sistem perundangan, administrasi, dan keruangan. Pemerintah memberikan pedoman pada pemerintah Kota / Kabupaten dalam menyiapkan program investasi jangka menengah.

Pada kenyataannya prioritas perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah belum tersebar dengan merata dalam hal ini perencanaan pembangunansarana publik. Sarana merupakan unsur penting dalam perencanaan pembangunan kota. Melalui otonomi daerah, penyediaan sarana publik dapat dilakukan secara leluasa oleh pemerintah daerah sehingga peningkatan kualitasnya dapat didasari kondisi yang ada. Salah satu sarana publik yang menjadi prioritas penting adalah pelayanan sarana pendidikan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu, pelayanan sarana pendidikan bagi masyarakat merupakan hal krusial yang perlu untuk diperhatikan secara matang. Dalam hal ini, hal yang cukup krusial terkait dengan pelayanan pendidikan adalah pemerataan

fasilitas sekolah bagi masyarakat, yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan secara merata dan menjangkau sampai di kawasan - kawasan terpencil, seperti di kawasan perbatasan yang jauh dari pusat kota.

Kawasan perbatasan ialah wilayah yang menjadi batasan tepi suatu administrasi wilayah lain. Jadi dalam suatu daerahnya khususnya di kawasan perbatasan harus mampu melayani kebutuhan masyarakatnya secara merata. Kawasan perbatasan mempunyai karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan kawasan lainnya di wilayah perkotaan. Bila kawasan fungsional kota sangat dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan yang dominan di kawasan tersebut, kawasan perbatasan sangat dipengaruhi oleh garis batas administratif yang terdapat di dalamnya (Wahyono, 2006). Karakteristik yang paling menonjol dari adanya garis batas wilayah di kawasan perbatasan antar daerah adalah bahwa di kawasan tersebut terdapat pertemuan pengaruh kewenangan yang berasal dari dua daerah atau lebih. Namun, dalam hukum suatu pelayanan pendidikan kenyataannya tidak mampu di batasi secara batas kewilayahan atau batas administasi. Hal ini dapat menimbulkan ketertarikan penggunaan fasilitas yang berasal dari daerah lain atau sebaliknya biasa disebut penggunaan lintas batas.

Kota Semarang dan Kabupaten Demak merupakan dua wilayah administrasi yang saling berbatasan sehingga menyebabkan terdapat kawasan perbatasan antara kedua daerah yang saling dipengaruhi oleh kebijakan tiap daerah. Perbedaan kemajuan pembangunan yang berbeda antara kedua daerah tersebut menimbulkan pergerakan lintas batas daerah, salah satunya diakibatkan oleh aktivitas pelayanan pendidikan, yaitu SMP N 3 Mranggen di Kabupaten Demak. Dilihat dari peran dalam tingkat pelayanan pendidikan Kota Semarang memiliki peran yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Demak dalam tingkat provinsi. Kota Semarang melakukan pemerataan pelayanan fasilitas sosial melalui penyediaan sarana fasilitas yang tersebar di seluruh kota. Penyediaan sarana pendidikan dilakukan secara merata dengan tujuan pelayanan yang mudah menjangkau kebutuhan masyarakat. Namun, perkembangan Kabupaten Demak yang berdekatan dengan Kota Semarang memiliki daya tarik tersendiri dengan keberadaan SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak.

Kajian mengenai pelayanan pendidikan lintas batas daerah di kawasan perbatasan menjadi topik yang menarik, dikarenakan dari latar belakang pelayanan suatu daerah tidak dapat dibatasi secara administratif dan dengan mencermati fenomena pelayanan pendidikan lintas batas daerah SMP N 3 Mranggen dapat menjadi referensi terhadap keterjangkauan suatu pelayanan fasilitas pendidikan suatu daerah, khususnya di kawasan perbatasan.

1.2 Perumusan Masalah

Penyediaan fasilitas pendidikan di kedua daerah ini tentunya merupakan tanggung jawab dari masing – masing daerah untuk melakukan pemerataan pelayanan pendidikan bagi masyarakatnya. Keberadaan SMP N 3 Mranggen dan kedekatan jarak yang terjadi antara kedua daerah tersebut, menimbulkan terjadinya penggunaan pelayanan lintas batas daerah, dimana sebagian atau beberapa pelajar dari Kota Semarang telah bersekolah di SMP N 3 Mranggen Kabupaten Demak. Di Kota Semarang sendiri sebenarnya telah memiliki kebijakan Rayonisasi sebagai strategi pemerataan pelayanan pendidikan. Rayonisasi adalah Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal penerimaan siswa berdasarkan 3 tempat asal, yaitu Dalam Rayon, Luar Rayon, Luar Daerah. Kebijakan Rayonisasi penyelenggaraan penerimaan siswa ini berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 13 Tahun 2009 tentang Sistem Penerimaan Peserta Didik. Namun tidak semua sekolah menerapkan kebijakan tersebut, terutama di kawasan perbatasan.

Wilayah studi yang dipilih ialah kawasan perbatasan antara Kabupaten Demak dan Kota Semarang. Perbedaan karakteristik di antara kedua kawasan ini tentang pengelolaan pelayanan pendidikan secara umum. Kabupaten Demak memiliki tingkat aktivitas perkotaan yang tinggi. Begitu pula yang terjadi dalam pelayanan sarana pendidikan dimana dalam memenuhi kebutuhan pelayanan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dimana Kota Semarang lebih memiliki beragam dan lengkap dalam aktivitas pelayanan pendidikan dibandingkan dengan Kabupaten Demak yang berbatasan langsung.

Sesuai dengan tema yang diangkat tentang pelayanan sarana pendidikan di kawasan perbatasan, dimana setiap wilayah memiliki kebijakan dalam memenuhi pelayanan pendidikan masing-masing. Dan kecenderungan yang terjadi Sekolah Menengah Pertama di Kota Semarang menjadi pilihan favorit dibandingkan dengan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Demak, Tetapi pada kenyataannya sebagian siswa – siswipada tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Semarang yang berbatasan langsung, lebih memilih bersekolah di SMP N 3 Mranggen Kabupaten Demak.

Melihat fungsi dan pengaruh pelayanan pendidikan lintas batas SMP N 3 Mranggen daerah di kawasan perbatasan yang cukup besar terhadap kawasan perbatasan dan hubungan antara Kota Semarang dan Kabupaten Demak, maka perlu diteliti lebih lanjut mengenai pengaruh pelayanan pendidikan lintas batas daerah di kawasan perbatasan tersebut.

Memperhatikan dari permasalahan pelayanan pendidikan lintas batas daerah SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak, menimbulkan pertanyaan peneliti sebagai berikut: **Bagaimana pelayanan SMP N 3 Mranggen, Kabupaten Demak, sebagai sarana pelayanan pendidikan lintas batas?**

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji pelayanan sarana pendidikan lintas batas daerah pada SMP N 3 Mranggen yang terjadi di kawasan perbatasan Kecamatan Mranggen (Kabupaten Demak) dengan Kecamatan Pedurungan (Kota Semarang).

1.3.2 Sasaran

Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengkaji pelayanan sarana pendidikan lintas batas daerah pada SMP N 3 Mranggen, maka disusun sasaran sebagai berikut:

- Mengkaji bentuk pelayanan lintas batas daerah SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang.
- Mengkaji mekanisme pelayanan lintas batas SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang
- Mengkaji hal-hal yang menyebabkan pelayanan lintas batas SMP N 3 di Kabupaten Demak dan Kota Semarang.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup wilayah yang menunjukkan cakupan wilayah studi penelitian dan ruang lingkup materi yang menunjukkan batasan substansi pembahasan dalam penelitian.

1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Studi ini mengkaji pelayanan sarana pendidikan lintas batas SMP N 3 Mranggen. Sarana pendidikan ini terletak di kawasan perbatasan Kecamatan Mranggen (Kabupaten Demak) dan Kecamatan Pedurungan (Kota Semarang). Kecamatan Mranggen merupakan kecamatan yang berada di sisi paling barat Kabupaten Demak sehingga berbatasan langsung dengan Kota Semarang. Di sisi lain, Kecamatan Pedurungan merupakan salah satu kecamatan yang berada di sisi timur Kota Semarang. Dalam hal ini, beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dipilihnya Kecamatan Mranggen dan SMP N 3 Mranggen sebagai lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang, sebagai kawasan perbatasan antara Kota Semarang dan Kabupaten Demak, Kecamatan Mranggen memiliki karakteristik kawasan periurban. Aktivitas yang terjadi di kawasan ini merupakan aktivitas campuran yang mengkomodifikasi kedua wilayah.
2. Di wilayah ini, terjadi pergerakan lintas batas setiap harinya, dimana hal ini menunjukkan bahwa kedua wilayah memiliki keterkaitan aktivitas yang sangat erat meskipun berada dalam dua batas wilayah administratif yang berbeda.

3. SMP N 3 Mranggen memiliki lokasi tepat di kawasan perbatasan, sehingga kajian mengenai pelayanan pendidikan di sekitar lokasi fasilitas ini akan menjadi menarik.

Untuk lebih jelasnya, lokasi kawasan perbatasan antara Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Pedurungan ini secara jelas dapat dilihat pada Gambar 1.1.

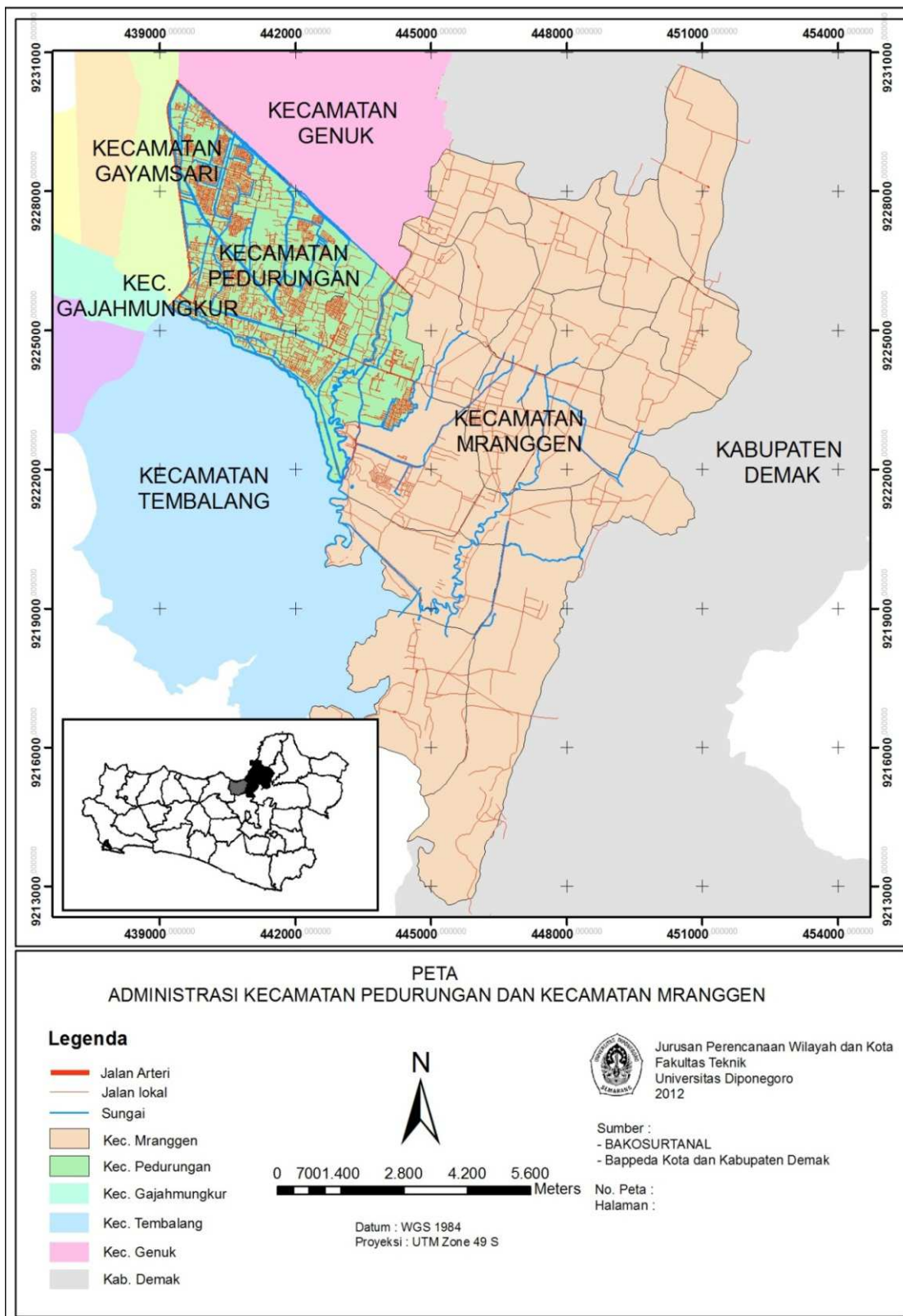
1.4.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini secara umum adalah mengkaji pelayanan sarana pendidikan lintas batas yang berada di kawasan perbatasan. Secara khusus, substansi pembahasan penelitian ini akan mengkaji mengenai interaksi masyarakat dalam penggunaan sarana pendidikan secara lintas batas, proses penggunaan sarana pendidikan lintas batas, serta hal yang mempengaruhi penggunaan sarana pendidikan lintas batas.

1.4.3 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan pengertian dari suatu bahasan yang dapat menjadi batasan dalam pembahasan dalam penelitian ini. Definisi operasional yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini antara lain:

- **Pelayanan umum**
Merupakan kegiatan yang diselenggarakan bagi kepentingan umum. Pelayanan umum timbul selain karena adanya kepentingan umum juga karena adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan organisasi. Fungsi utama pelayanan umum ialah melayani publik umum atau kepuasan masyarakat diutamakan (Sugiyono, 2008).
- **Kawasan perbatasan**
Kawasan perbatasan merupakan kawasan dengan sifat heterogen dalam konteks baik pengaruh struktur politik maupun ekonomi. Kawasan ini merupakan kawasan yang menggabungkan dua atau lebih satuan politik yang berbeda, baik antar kabupaten, provinsi, maupun negara (Guo, 2005).
- **Pelayanan Lintas Batas Daerah**
Pelayanan lintas batas daerah merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara satu pihak kepada pihak yang lain, baik dengan dengan alat maupun tidak, demi menyiapkan kebutuhannya dari suatu dari daerah ke daerah yang lain (Adunair, 2007).
- **Sarana Pendidikan**
Sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. (Swastha, 2001).



Sumber: Bappeda Kota Semarang dan Kabupaten Demak

Gambar 1.1

Peta Administrasi Kecamatan Pedurungan dan Kecamatan Mranggen

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat yang dapat diperoleh langsung setelah dilakukannya penelitian ini. Manfaat praktis dari penelitian ini antara lain:

1. Dengan mengetahui mekanisme dan bentuk pelayanan pendidikan lintas batas daerah SMP N 3 Mraggen pada kawasan perbatasan ini dan juga sebagai *best practice* dalam hal pengelolaan sarana di kawasan perbatasan bagi daerah lain jika pengelolaan yang dilakukan sudah cukup baik.
2. Dengan mengetahui penyebab yang melandasi dilakukannya kondisi pelayanan pendidikan lintas batas daerah SMP N 3 Mraggen pada kawasan perbatasan ini, maka dapat bermanfaat untuk mengetahui siapayang mengelola dan mengapapelayanan pendidikan lintas batas daerah SMP N 3 Mraggen pada kawasan perbatasan dapat terjadi.

Kedua manfaat praktis diatas menunjukkan bahwa manfaat diatas merupakan manfaat yang dapat dijadikan sebagai masukan dalam hal pelayanan lintas batas daerah SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan.

1.5.2 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal manajemen perkotaan di kawasan perbatasan, khususnya dalam manajemen pengelolaan sarana dan prasarana umum lintas batas daerah. Penelitian ini dikhususkan untuk mengkaji bagaimana kerjasama yang dapat dilakukan antara dua pemerintah daerah dalam pelayanan pendidikan lintas batas daerah di kawasan perbatasan. Bentuk kerjasama maupun prosedur kerjasama antar daerah tertentu yang dilakukan tidak selalu bisa diterapkan pada daerah lainnya, sehingga perlu dipahami karakteristik masing-masing daerah yang terkait.

1.6 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan perbandingan penelitian yang akan disusun dengan penelitian-penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam hal ini Penelitian mengenai pelayanan pendidikan lintas batas daerah SMP N 3 Mranggen pada kawasan perbatasan ini belum pernah di pakai sebagai objek penelitian. Tetapi penelitian tersebut sejenis dengan peneliti-peneliti yang meneiti kawasan perbatasan sebagai kawasan terpilih penelitian.

Dalam penelitian ini wilayah yang dipilih yaitu perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak, karena adanya masalah pelayanan pendidikan. Kurang meratanya pembangunan sarana pendidikan menyebabkan adanya pelayanan pendidikan lintas batas daerah. Penelitian ini di fokuskan pada pelayanan pendidikan lintas batas daerah SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan tersebut, karena adanya beberapa peserta didik yang berasal dari Kota Semarang yang

lebih memilih bersekolah di Kabupaten Demak. Di dalam penelitian ini mengkaji penyebab dan bagaimana cara pelayanan pendidikan lintas batas daerah SMP N 3 Mranggen pada kawasan perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak.

Walaupun pada penelitian sebelumnya telah ada yang melakukan penelitian mengenai pengaruh universitas tersebut, akan tetapi dalam penelitian ini berbeda baik itu dari segi pembahasan maupun wilayah studi. Sehingga dengan adanya penjelasan mengenai keaslian penelitian dapat menghindari adanya unsur plagiat dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Adapun posisi penelitian ini terhadap penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL. I.1
KEASLIAN PENELITIAN

	Penelitian I	Penelitian II	Penelitian yang Dilakukan
Nama	Andi Wirda Febriyanti	Ajar Utomo Brahmantiyo	Grandy Loranessa Wungo
Tahun Penelitian	2004	2007	2013
Judul	Tingkat pemenuhan dan aksesibilitas fasilitas sosial di Kecamatan Semarang Selatan dan Kecamatan Genuk	Pelayanan sarana pendidikan di kawasan perbatasan Semarang - Demak	Pelayanan pendidikan lintas batas daerah SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang.
Lokasi dan tahun penelitian	Kecamatan Banyumanik tahun 2004	Kecamatan Genuk dan Sayung, tahun 2006	Kabupaten Demak dan Kota Semarang.
Materi penelitian	Melakukan analisis kondisi pelayanan fasilitas sosial di Kecamatan Banyumanik berdasarkan persepsi penduduk dan standar yang berlaku dalam upaya memberi rekomendasi pengembangan fasilitas sosial di Kecamatan Banyumanik sebagai pengembangan wilayah permukiman.	Mengkaji kondisi pelayanan sarana pendidikan setingkat SMP dan SMA di kawasan perbatasan Semarang – Demak (wilayah studi Genuk dan sayung)	Mengkaji pelayanan sarana pendidikan lintas batas SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang
Metode	Deskripsi dan pembobotan	Analisis deskripsi dan analisis pembobotan	Pendekatan kualitatif

	Penelitian I	Penelitian II	Penelitian yang Dilakukan
Kisi – kisi penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi pelayanan fasilitas - Ketersediaan fasilitas - Pola pemafaatan fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> - Kajian kondisi pelayanan sarana pendidikan - Komparasi ketersediaan sarana pendidikan kedua kecamatan - Kajian hubungan antara dua wilayah administrasi dalam pe;ayanan sarana pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> - Interaksi yang terjadi antara kedua wilayah dalam memenuhi kebutuhan sarana pendidikan
Hasil Penelitian	Kualitas pelayanan fasilitas sosial menurut persepsi masyarakat terhadap fasilitas sosial eksisting	<ul style="list-style-type: none"> - Perbandingan ketersediaan sarana pendidikan terhadap pengguna - Kondisi pelayanan sarana pendidikan di genuk dan di sayung - Kaitan batas administratif dan pola pemanfaatan penduduk terhadap sarana pendidikan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkaji pelayanan pendidikan lintas batas SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang. - Mengetahui mekanisme pelayanan sarana pendidikan lintas batas SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang - Mengetahui penyebab terjadinya pelayanan sarana pendidikan lintas batas SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan Kabupaten Demak dan Kota Semarang

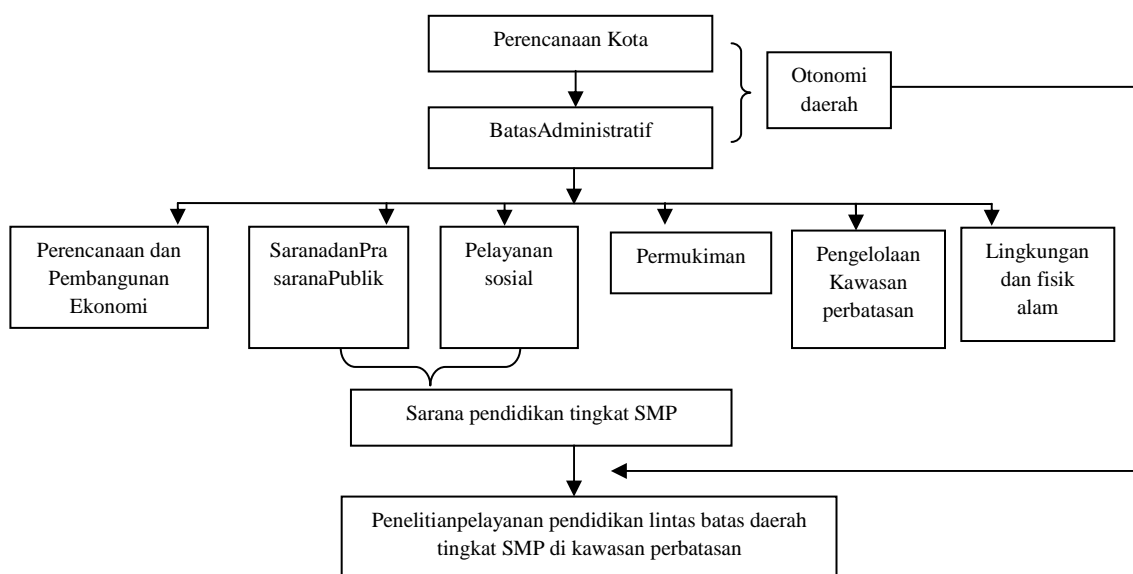
Sumber: Hasil Analisis, 2013

1.7 Posisi Penelitian dalam Ilmu Perencanaan Wilayah dan Kota

Pada ilmu perencanaan wilayah dan kota, pengelolaan sarana merupakan aspek yang penting untuk dipertimbangkan. Pembangunan dan pelayanan suatu wilayah maupun kota dalam hal sarana publik dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan, khususnya sarana pendidikan baik di dalam maupun antar daerah.

Pembangunan dan pelayanan suatu wilayah maupun kota dalam hal sarana publik dapat mencerminkan tingkat keberhasilan pembangunan. Posisi penelitian dapat dilihat dari kedudukan peneliti dalam disiplin ilmu perencanaan wilayah kota, penelitian ini merupakan bagian dari ilmu perencanaan kota yang meliputi pelayanan pendidikan, sarana, perencanaan, dan kawasan perbatasan.

Penyusunan rencana dalam ilmu perencanaan wilayah dan kota disusun berdasarkan hirarki tata ruangnya. Perencanaan prasarana publik merupakan salah satu perencanaan yang mutlak diperlukan dalam merencanakan sebuah kota, karena prasarana merupakan aspek penting yang dapat mendukung segala aktivitas penduduk di perkotaan.

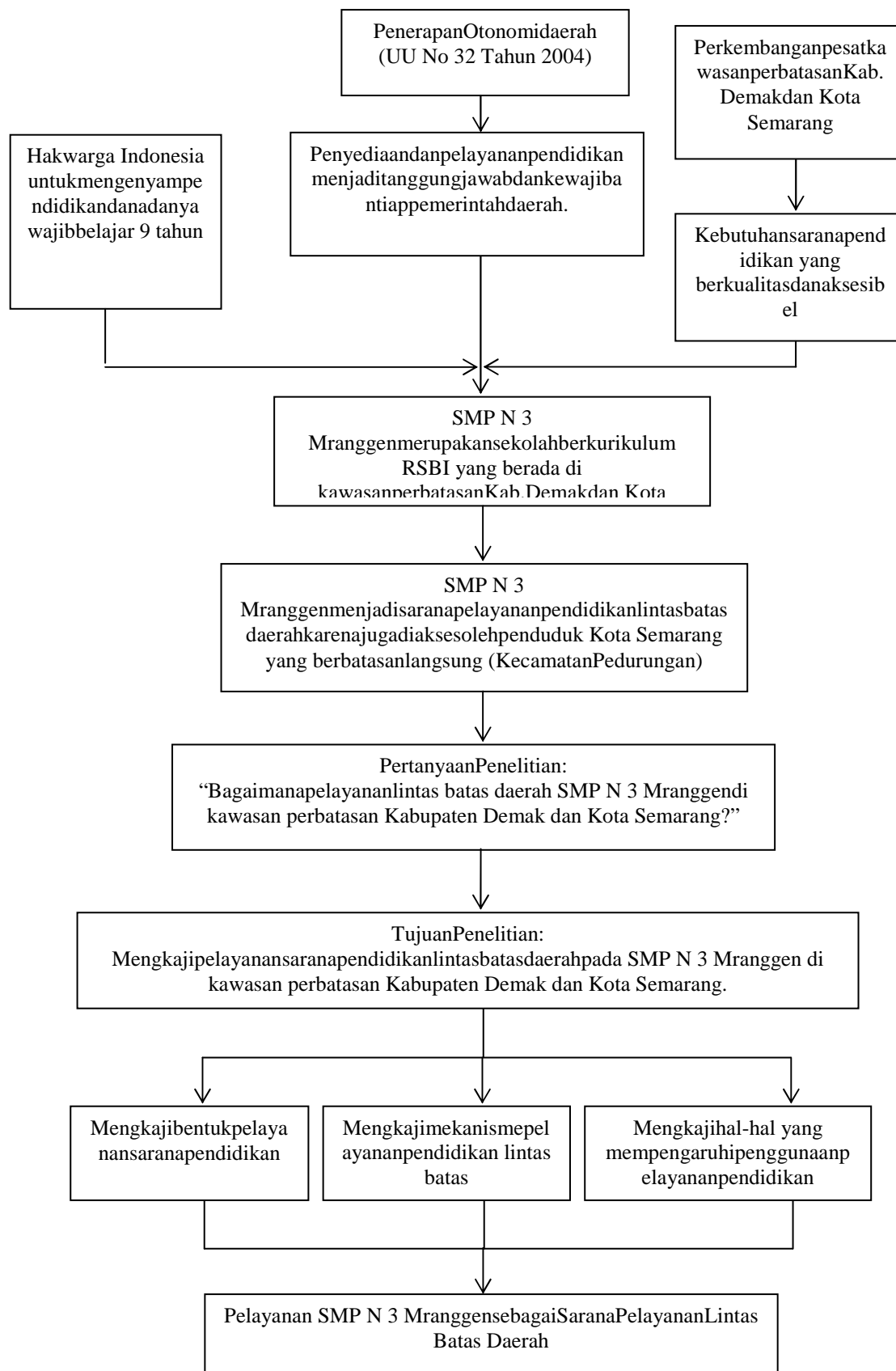


Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2013

Gambar 1.2
Posisi Penelitian dalam Perencanaan Wilayah dan Kota

1.8 Kerangka Pikir

Pelaksanaan pelayanan pendidikan lintas batas daerah SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan ini nantinya akan ditinjau mengenai kondisi, fungsi, peran, prosedur dan bentuk kerja sama, serta penyebab yang melandasi pelayanan pendidikan lintas batas daerah. Tinjauan tersebut nantinya akan dapat menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana pelayanan pendidikan lintas batas daerah SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Bagan kerangka pemikiran ini dapat dilihat pada Gambar 1.3



Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2013

Gambar 1.3
Kerangka Pikir Penelitian

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian mengenai pelayanan pendidikan lintas batas SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan ini didasari adanya penggunaan sarana pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama hingga melintasi batas administratif di kawasan perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak. Dampak yang paling dapat dirasakan adalah kurang meratanya jangkauan pelayanan dari SMP N 3 Mranggen yang seharusnya memprioritaskan pelajar dari daerah sesuai dengan kebijakan dari otonomi daerah, tetapi pada kenyataannya sebagian besar pelajar dari Kota Semarang juga bersekolah di SMP N 3 Mranggen. Kecenderungan perkembangan ini memberikan konsekuensi kewajiban pelayanan pendidikan yang memiliki kualitas baik dan merata. Penelitian ini difokuskan pada pelayanan pendidikan lintas batas di kawasan perbatasan Kota Semarang dan Kabupaten Demak yang meliputi siapa stakeholder yang terkait, hubungan antar stakeholder, prosedur serta bentuk pelayanan yang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk pelayanan pendidikan lintas batas pada kawasan perbatasan secara mendalam, hal ini sesuai dengan prinsip pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini digunakan untuk memahami objek secara mendalam. Pendekatan ini merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Menurut Creswell (2009), pendekatan penelitian kualitatif berusaha membangun informasi yang didapatkan dari pandangan-pandangan individu secara sosial untuk menjelaskan suatu fenomena. Oleh karena itu pendekatan kualitatif tepat digunakan untuk meneliti suatu fenomena sosial melalui penggalian informasi langsung dari sumber secara mendalam. Dalam penelitian kualitatif peneliti berperan besar dalam menentukan kualitas maupun hasil penelitian karena bersifat subjektif. Berdasarkan Bungin (1997), pendekatan kualitatif ini memberikan proses interaksi yang besar antara peneliti dengan narasumber sehingga akan muncul aspek idealisme maupun subjektivitas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki ketergantungan pada kapasitas orang-orang yang dilibatkan di dalamnya, termasuk peneliti.

1.9.2 Metode Penelitian

1.9.2.1 Metode Pengumpulan Data

Data merupakan informasi yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan proses penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian bergantung pada pendekatan penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini, metode pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara ini merupakan metode pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam pengumpulan data, khususnya pada penelitian dengan

pendekatan kualitatif. Pada pendekatan kualitatif membutuhkan proses penggalian informasi yang mendalam dari berbagai narasumber. Wawancara ini dilakukan melalui komunikasi langsung peneliti kepada narasumber yang telah ditentukan dan yang berkompeten dalam objek penelitian ini. Tingkat kedalaman informasi yang dapat dihasilkan dari metode pengumpulan data ini adalah kemampuan dan pengetahuan peneliti dalam menanyakan suatu pertanyaan.

2. Penelitian dokumen dan arsip

Teknik pengumpulan data ini termasuk dalam teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data ini mempelajari berbagai temuan, fakta, dan data yang tersimpan tersimpan dalam dokumen maupun arsip. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dokumen maupun arsip yang dapat dipelajari antara lain dokumen kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan sarana lintas batas maupun aturan penerimaan murid baru dari luar daerah. Di sisi lain juga perlu didapatkan data-data mengenai sekolah dan murid yang menunjang tercapainya tujuan penelitian ini. Dokumen ini dapat didapatkan melalui instansi pemerintahan maupun pihak sekolah yang terkait.

3. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan atau observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang cukup efektif untuk mempelajari suatu objek. Observasi merupakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan atau objek yang sedang berlangsung. Observasi secara langsung dalam penelitian ini dapat dilakukan untuk mengamati kondisi sekolah dan segala sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar.

1.9.2.2 Kebutuhan Data

Kebutuhan data menjadi acuan utama peneliti dalam melakukan pengumpulan data penelitian. Kebutuhan data ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi peneliti dalam memeriksa kelengkapan data yang telah diperoleh selama survei. Kebutuhan data penelitian ini dirinci dalam table kebutuhan data seperti halnya pada Tabel I.2

TABEL I.2
KEBUTUHAN DATA PENELITIAN

No	Sasaran	Kisi-Kisi	Kebutuhan Data	Tahun	Bentuk Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
1	Bentuk pelayanan lintas batas SMP N 3 Mranggen di kawasan perbatasan	- Karakteristik pengguna pelayanan	Data jumlah siswa SMPN 3 Mranggen beserta asal tempat tinggal - Daerah asal - Alamat tinggal - Prestasi akademik	2012	- Deskripsi - Tabel	- Survey Sekunder (Dokumen/ Arsip) - Wawancara (Kepala Sekolah)	SMP N 3 Mranggen
		- Kondisi sosial ekonomimasyarakatsebagai pengguna pelayanan	- Data penduduk kawasan perbatasan berdasarkan mata pencaharian - Data penduduk kawasan perbatasan berdasarkan tingkat pendidikan - Data mata pencaharian orang tua wali murid	2012	- Deskripsi - Tabel	- Survey Sekunder (Dokumen/ Arsip) - Wawancara (Kepala Sekolah)	- Bappeda Kab. Demak - BPS Kab. Demak
		- Lokasi/ aksesibilitas sekolah ditingkasan pendidikan lain yang setingkat	- Peta sebaran lokasi SMP di Kec. Mranggen, Kab Demak - Peta sebaran lokasi SMP di Kec. Pedurungan, Kota Semarang - Peta kondisi jaringan jalan kawasan perbatasan	2012	- Peta	- Survey instansi - Observasi	- Bappeda Kab. Demak - Bappeda Kota Semarang
		- Kondisi fisik dan kualitas sekolah	- Kurikulum pendidikan sekolah - Akreditasi sekolah - Jumlah kelas dan penjurusan - Fasilitas pendukung - Kesesuaian kondisi sekolah dengan standar pelayanan sarana pendidikan	2012	- Deskripsi - Tabel - Foto	- Survey Sekunder (Dokumen/ Arsip) - Observasi - Wawancara	SMP N 3 Mranggen
2	Mekanisme pelayanan lintas batas SMP N 3 Mranggen di	- Prosedur penggunaan sarana pelayanan pendidikan lintas batas	- Aturan mengenai pendaftaran - Penerapan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan murid luar kota - Aturan kuota murid luar kota	Terbaru	- Deskripsi	- Wawancara - Survey Sekunder (Dokumen/ Arsip)	- Dinas Pendidikan - SMPN 3 Mranggen

No	Sasaran	Kisi-Kisi	Kebutuhan Data	Tahun	Bentuk Data	Teknik Pengumpulan Data	Sumber
	kawasan perbatasan	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan pemerintah daerah atau pun sekolah mengenai pelayanan pendidikan lintas batas - Stakeholder yang berpengaruh dalam proses pengelolaan pendidikan lintas batas 	<ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan terkait rayonisasi - Kebijakan kuota pendaftaran murid luar kota - Peran dinas/ kantor yang mempengaruhi pengelolaan sarana lintas batas - Wewenang dan tugas tiap stakeholder - Efektivitas stakeholder dalam melakukan pengelolaan sarana perbatasan 	2012	- Deskripsi	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Survey sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - SMPN 3 Mranggen
3	Hal-hal yang menyebabkan pelayanan lintas batas SMP N 3 Mranggen	<ul style="list-style-type: none"> - Alasan penggunaan sarana pelayanan lintas batas (kualitas/ jarak/ biaya) - Pengaruh pelayanan lintas batas SMP N 3 Mranggen terhadap penyediaan layanan pendidikan di daerahnya sendiri - Hambatan / permasalahan dalam pengelolaan sarana lintas batas 	<p>Alasan pemilihan SMP 3 Mranggen (sarana pendidikan lintas batas):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kualitas sekolah - Keterjangkauan lokasi - Lain-lain (biaya, etc) 	Terbaru	- Deskripsi	- Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat (wali murid) - Kepala sekolah - Guru
			<ul style="list-style-type: none"> - Data penerimaan peserta didik baru (5 tahun terakhir, untuk melihat proporsi murid setempat dan luar kota) - Perkembangan kualitas sekolah dan lulusan SMP dalam kurun 5 tahun terakhir - Permasalahan mengenai proporsi kuota murid baru (Demak-Semarang) 	2008 – 2012	<ul style="list-style-type: none"> - Tabel - Deskripsi 	<ul style="list-style-type: none"> - Wawancara - Survey sekunder 	<ul style="list-style-type: none"> - SMPN 3 Mranggen
			<ul style="list-style-type: none"> - Permasalahan dalam hal pengelolaan sarana lintas batas 	Terbaru	- Deskripsi	- Wawancara	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - SMPN 3 Mranggen

Sumber: Hasil Analisis, 2012

1.9.2.3 Penentuan Narasumber

Penentuan narasumber digunakan agar hasil wawancara yang dilakukan valid, jelas, serta mendukung kajian utama mengenai pelayanan sarana pendidikan lintas batas. Penentuan narasumber dilakukan dengan metode *snowballing*. *Snowball* digunakan apabila data atau hasil wawancara tersebut membutuhkan pendetailan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang nantinya dapat melengkapi data yang dibutuhkan. Teknik *snowball* sangat bermanfaat ketika mengidentifikasi suatu populasi yang sebelumnya tidak dikenal. Menghubungkan anggota dari suatu populasi dengan satu sama lain dengan mewawancarai secara langsung merupakan suatu prosedur yang layak untuk mengidentifikasi semua anggota menyangkut populasi itu (Sugiyono, 2008: 85). Metode *snowballing* ini perlu menentukan narasumber utama yang akan dijadikan acuan dalam mendapatkan keseluruhan informasi yang terkait dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, narasumber utama adalah Kepala Sekolah SMP N 3 Mranggen sebagai narasumber yang dianggap paling mengetahui adanya fenomena pelayanan lintas batas di sekolah tersebut.

1.9.2.4 Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan tahapan dimana dilakukan pemeriksaan tentang kebenaran sesuatu misalnya suatu laporan dan suatu informasi. Dalam tahapan ini dilakukan penstrukturan data agar data-data yang didapat lebih mudah diolah. Data yang didapatkan nantinya akan dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan sehingga perlu diperiksa kebenarannya. Verifikasi data dapat dilakukan dengan cara triangulasi data.

Triangulasi data berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Moleong, 1990). Triangulasi data dari penelitian ini diperoleh dengan meng-*cross check* informasi antara informan yang satu dengan informan yang lain. Menurut Sugiyono (2008) terdapat tiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik dalam hal ini digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama namun dengan menggunakan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan data dengan waktu yang berbeda.

1.9.2.5 Pengolahan Data

Data hasil survei yang telah diverifikasi maka dapat dijadikan sebagai informasi utama dalam penelitian. Setelah data terkumpul lengkap maka dilakukan pengolahan data yang meliputi pengkodean data, reduksi data, dan kategorisasi data.

1. Pengkodean Data

Pengkodean merupakan tahapan dalam pemberian keterangan simbol tertentu pada suatu kutipan informasi sesuai dengan keterangan yang ada dalam informasi ini. Pengkodean data ini dapat dilakukan dengan memberi label angka maupun huruf untuk menyatakan sumber data, tema, sumber, dan jenis informasi yang ada. Kode ini memudahkan peneliti dalam melakukan kategorisasi data dan penyusunan analisis.

TABEL I.3
FORMAT KARTU IDENTITAS HASIL WAWANCARA

Kode	Data / Informasi	Keterangan
a.../ b.../ c.../ d...

Sumber: Hasil Analisis, 2012

Keterangan:

a = tema informasi

b = jenis informasi

c = sumber informasi

d = menunjukkan nomor informasi

2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan untuk menghilangkan informasi yang tidak sesuai dengan konteks penelitian sehingga dapat mengurangi resiko adanya pembahasan yang kurang relevan terhadap penelitian. Secara teoritis, menurut Miles (1994) reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan.

3. Kategorisasi Data

Tahapan kategorisasi data ini berkesinambungan dengan proses pengkodean data. Data yang telah terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tema analisis, yang terdapat pada kode yang telah disusun. Data yang telah dikategorikan akan mempermudah peneliti dalam menyusun analisis.

1.9.3 Metode Analisis Data

Metode analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis tematik. Pada dasarnya, analisis tematik ini dilakukan melalui perumusan hubungan antara beberapa kelompok informasi yang terdapat dalam suatu tema yang mendukung tujuan dan sasaran penelitian. Berdasarkan Saldana (dalam Guest, 2012), tema merupakan kalimat dalam suatu

rangkaian informasi yang menunjukkan makna dari suatu unit informasi tersebut. Tema penelitian dapat diidentifikasi dengan mendapatkan inti dari jawaban pertanyaan atau penjelasan narasumber maupun kesimpulan dari rangkuman informasi yang ada.

Berdasarkan Guest (2012), penggunaan metode analisis ini ditekankan pada segmentasi/identifikasi data dan informasi, kategorisasi tema penelitian, dan pengkodean berdasarkan hasil kategorisasi tema. Pada segmentasi data dan informasi dilakukan melalui identifikasi terhadap keseluruhan informasi yang didapatkan yang kemudian saling dihubungkan untuk memperoleh keterkaitan dengan tema penelitian. Pada tahap ini dapat ditemukan hubungan antara informasi dengan tema maupun sub tema penelitian yang telah disusun. Berdasarkan tema dan sub tema yang telah disusun tersebut dapat disusun suatu kode informasi untuk melabeli suatu informasi agar mudah distrukturkan dan dikategorisasikan. Penyusunan kode ini dapat dilakukan baik dengan angka maupun huruf yang menunjukkan tema dan sub tema secara berurutan. Setelah kode tersebut disusun, dilakukan pengkategorian data berdasarkan kode. Penyusunan analisis nantinya akan mengikuti hasil kategorisasi data yang telah disusun.

1.10 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini menunjukkan substansi pembahasan penelitian ini berdasarkan bab pembahasan. Sistematika penulisan laporan ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang alasan pemilihan tema penelitian. Dalam bab ini juga berisi tentang tujuan, sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian serta permasalahan yang terjadi di wilayah studi. Selain itu, terdapat kerangka pikir dalam penelitian yang akan dilakukan sehingga dapat diketahui kronologis cara kerja dalam penelitian tersebut. Bab pendahuluan ini juga menerangkan terkait manfaat, keaslian penelitian, posisi, serta metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini.

BAB II KAJIAN LITERATUR PELAYANAN PENDIDIKAN LINTAS BATAS DAERAH

Pada bab ini mengkaji mengenai konsep dasar yang terkait dalam lingkup materi penelitian ini, yang meliputi konsep otonomi daerah, kawasan perbatasan, sarana publik, manajemen pelayanan publik, serta konsep pengelolaan sarana lintas batas daerah.

BAB III GAMBARAN SMP N 3 MRANGGEN SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN DI KAWASAN PERBATASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai wilayah studi di kawasan perbatasan antara Kabupaten Demak dan Kota Semarang, yaitu Kecamatan Mranggen dan Kecamatan Pedurungan. Di sisi lain juga terdapat gambaran umum mengenai SMP N 3 Mranggen, sebagai sarana pendidikan di kawasan perbatasan.

BAB IV ANALISIS PELAYANAN SMP N 3 MRANGGEN SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN LINTAS BATAS DAERAH

Bab ini berisi mengenai kajian inti penelitian pelayanan SMP N 3 Mranggen sebagai sarana pendidikan yang berada di kawasan perbatasan. Analisis akan disusun berdasarkan temuan penelitian yaitu kajian mengenai bentuk pelayanan lintas batas SMP N 3 Mranggen, analisis mengenai mekanisme pelayanan SMP N 3 Mranggen, dan hal yang menyebabkan pelayanan lintas batas SMP N 3 Mranggen.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan penelitian yang ditindaklanjuti dengan penyusunan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelayanan pendidikan lintas batas. Selain itu, juga diberikan rekomendasi untuk penelitian lanjutan.